

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR  
PENDIDIKAN, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN  
ANGKATAN KERJA TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA  
(Pendekatan Data Panel 30 Provinsi di Indonesia Periode 2011-2016)**

**Desi Fatonah**

**Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183  
No. Telp: 0274 38769 (hotline), 0274387656 ext. 199/200 No Fax: 0274387649**

**Email: [desifatonah3@gmail.com](mailto:desifatonah3@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Poverty is a problem in parts of the world especially phenomenal Indonesia which is a developing country. Still high poverty or poor population in Indonesia, indicated by the percentage of the poor population, shows the process of economic development that has not been able to improve the welfare of its people. To address the problem of poverty, the first to do an analysis of the factors that affect poverty or poor population of Indonesia during the period of 2011-2016 years. The variables used in this study was government spending sectors of education (the education budget), Gross Regional Domestic Product (GRDP), and the labor force. This study uses secondary data composed of six years, beginning in 2011-2016 obtained from the website of the Central Bureau of statistics, BAPPENAS, Ministry of Finance and the General Equalization. Methods of analysis used for this research use the data panel, in which there is a fixed effect test, multikolinieritas test, chow test, heterokesdatisitas test, and the determination of  $R^2$  test. Analysis of the results of this research shows that Government spending on Education Sector a positive and significant effect against poverty, GRDP positive and significant effect against poverty, and the negative effect and labor force significant to poverty.*

*Keywords: Poverty, education budget, GRDP, labor force, and panel data*

## PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia salah satunya adalah sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan atau menekan tingkat kemiskinan yang ada. Menurut Nasir dan Saichudin (2008) persoalan kemiskinan memang merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Kemiskinan yang telah berputar seperti di Negara-negara berkembang salah satunya Indonesia telah menjadi momok dan sangat penting untuk diberikan solusi dalam ekonomi, sehingga harus dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Kondisi kemiskinan yang terjadi didasari oleh ketidakmampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi permasalahan kemiskinan mereka dan juga terjadi akibat kurang maksimalnya program atau kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut (Haughton dan Shahidur dalam Wibowo, 2014).

**Tabel 1.1**

Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2011-2016

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)</b>	<b>Presentase Penduduk Miskin (%)</b>
2011	29,89	12,36
2012	28,59	11,66
2013	28,55	11,47
2014	27,73	10,96
2015	28,51	11,13
2016	27,76	10,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada tabel 1.1 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2016, selama beberapa tahun memang terus menurun, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan presentase penduduk miskin. Badan Pusat Statistik menyebutkan alasan yang menjelaskan sebab dari kenaikan tersebut yaitu disebabkan oleh inflasi yang tinggi. Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki inflasi memang tinggi dalam dua tahun terakhir, terutama karena beberapa penyesuaian yang dibuat dalam kebijakan bahan bakar bersubsidi di Indonesia selama dua tahun terakhir, antara September 2014 sampai Maret 2015 tingkat inflasi di Indonesia berakumulasi

menjadi 4,03%. Selama periode ini, harga rata-rata beras naik 14,5%. Ini menjadi masalah besar karena penduduk miskin Indonesia menggunakan porsi yang signifikan dari pendapatan mereka yang siap dibelanjakan untuk membeli beras. Dengan pemahaman yang memadai terhadap masalah kemiskinan termasuk berbagai faktor penyebabnya, maka diharapkan para pembuat kebijakan atau pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan program tepat sasaran, sehingga masalah kemiskinan dapat dipecahkan atau setidaknya dapat dikurangi sampai pada tingkat yang serendah mungkin. Sangat ironis memang, Indonesia yang dikenal memiliki dan kaya akan sumber daya alam, namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia selama ini. Faktanya di satu sisi pemerintah telah banyak melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi di sisi lain kemiskinan ternyata masih saja menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia.

Sekelompok orang atau individu menjadi tidak miskin dengan bantuan peran pemerintah yaitu sangatlah penting. Dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tertuang pada anggaran yang dikeluarkan. Tujuan pengeluaran pemerintah yaitu untuk peningkatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Pengeluaran di sektor pendidikan sangat diperlukan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Raghbendra (2001) menyatakan belanja pendidikan membantu menurunkan tingkat kemiskinan, manfaatnya yaitu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin lebih besar dari pada jenis lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi salah satu prioritas pembangunan suatu negara, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat

pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut Mulyadi (2014) jumlah atau besarnya penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan *income per capita* suatu negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Artinya semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Prawoto (2016), menyatakan bahwa pengangguran adalah masalah yang sangat kompleks yang dialami setiap negara berkembang, di Indonesia banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Menurut Badan Pusat Statistik masalah angkatan kerja atau pengangguran saat ini masih menjadi ancaman bagi pemerintah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum berdampak pada peningkatan jumlah lapangan tenaga kerja. Hal ini juga belum terlepas dari efektifnya program pemerintah pada sektor pariwisata dan sektor industri. Adapun keinginan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan angkatan kerja atau pengangguran. Caranya, dengan menambah alokasi dana desa lebih besar kepada desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk banyak dengan tujuan untuk menekan angka kemiskinan.

## METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011-2016. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Angkatan Kerja di 30 Provinsi Indonesia pada tahun 2011-2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dalam bentuk data sekunder dan tergolong dalam jenis data kuantitatif.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis yaitu *Panel Least Square*. Menurut Basuki dan Yuliadi (2015) terdapat 3 pendekatan dalam

metode analisis ini yaitu *common effect model/pooled model*, *fixed effect model*, *random effect model*. *Common effect model* adalah pendekatan regresi data panel sederhana, di mana pada pendekatan ini model hanya mengkombinasikan data *cross section* dan *data time series*. Pendekatan *fixed model* mengasumsikan perbedaan intersep dapat mengakomodasi perbedaan antar individu. Estimasi dalam model *fixed effect* ini dilakukan dengan teknik variabel *dummy*, teknik variabel *dummy* digunakan untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Model estimasi ini disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Pendekatan *random effect* melakukan estimasi data panel ketika variabel gangguan mungkin akan saling berhubungan antar waktu antar individu.

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015) untuk memilih model yang paling tepat dalam mengolah data panel, maka perlu dilakukan beberapa pengujian melalui *chow test*, *hausman test* dan *langrange multiplier test*. *Chow Test* adalah uji yang dilakukan dalam menentukan ketepatan model estimasi antara *pooled* atau *fixed* di mana hipotesis yang digunakan yaitu,  $H_0$  adalah *Pooled Model* dan  $H_1$  adalah *Fixed Effect model*. Jika nilai probabilitas *Chow Test* lebih kecil dari 0,05 (5%) maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang paling tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sebaliknya jika nilai probabilitas *Chow Test* lebih besar dari 0,05 (5%) maka model yang cocok dalam mengestimasi data panel adalah *Pooled Model*.

*Hausman test* ialah uji yang dilakukan untuk menentukan ketepatan model estimasi antara *Fixed* atau *Random*, di mana hipotesis yang digunakan yaitu,  $H_0$  adalah *Fixed Effect Model*  $H_1$  adalah *Random Effect Model* Jika nilai probabilitas *hausman test* lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, yang artinya model yang cocok dalam menganalisis data panel adalah *fixed effect model*. Namun jika hasil probabilitas *hausman test* lebih kecil dari 0,05 maka model yang tepat untuk mengestimasi data panel adalah *random effect model*. Uji *langrange multiplier* dilakukan agar dapat mengetahui ketepatan model estimasi antara *pooled* dan *random*. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Analisis regresi dengan menggunakan data panel memungkinkan peneliti mengetahui karakteristik antar waktu dan antar individu dalam variabel yang bisa saja berbeda-beda. Adapun model rumus regresi data panel adalah sebagai berikut (Basuki dan Yuliadi, 2015)

$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e$$

$$K_{it} = \alpha + b_1PDRB_{it} + b_2PPSP_{it} + b_3AK_{it} + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Kemiskinan)

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$ PDRB = Variabel Independen 1 (PDRB)

$X_2$ PPSP = Variabel Independen 2 (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan)

$X_3$ AK = Variabel Independen 3 (Angkatan Kerja)

b (1,2,3) = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

i = Aceh,.....,Papua

t = 2011,.....,2016

e = Error term

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan estimasi pada data panel, tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan model estimasi yang tepat pada data panel. Salah satu metode dalam menentukan model estimasi yang tepat pada data panel adalah uji chow. Uji chow digunakan sebagai salah satu teknik memilih model estimasi antara *Fixed Effect* dan *Pooled*. Di mana  $H_0$  adalah model estimasi *Pooled* dan  $H_1$  adalah model estimasi *Fixed Effect*. Jika hasil probabilitas uji chow lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima yang artinya model yang tepat untuk digunakan dalam analisis data panel adalah model *pooled*. Dan jika hasil probabilitas Uji Chow lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak, yang artinya model estimasi yang tepat untuk data panel adalah *Fixed Effect*. Berikut hasil uji chow dalam penelitian ini:

**Tabel 5.4**

Hasil *Chow Test*

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	5,329615	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	129,335864	0,0000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji chow yang telah dilakukan pada tabel 5.4 dapat diketahui bahwa nilai *Prob. Chi-Square* dari hasil uji chow lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), yaitu  $0,0000 < 0,05$ . Artinya  $H_0$  ditolak atau dengan kata lain model estimasi yang tepat untuk analisis pada data panel dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*.

Berikut hasil estimasi dari pengolahan data menggunakan *Panel Least Square* dengan *Fixed effect*:

**Tabel 5.5**

Hasil Analisis *Panel Least Square Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5,899209	15,10287	-0.390602	0,6967
LOGPEND	0,327324	0,089994	3.637166	0,0004
LOGPDRB	3,373913	0,721483	4.676357	0,0000
LOGANG	-3,357476	1,571723	-2.136176	0,0343

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil estimasi data pada tabel 5.5 menjelaskan bahwa pada variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 1% akan menyebabkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,32%. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan adanya pengaruh negatif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia. Hubungan antara variabel kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam hasil estimasi data ternyata tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Menurut Suparmoko (2002) bentuk investasi langsung untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu pengeluaran pemerintah.

Hasil estimasi data tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dikarenakan pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan untuk keluarga miskin belum efektif dan

efisien. TNP2K dalam Zulyanto (2017), berdasarkan laporan pemantauan lapangan dana pendidikan yang dilakukan Tim Pencegahan KPK pada tahun 2014, terdapat empat permasalahan mendasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data yang kurang memadai), kekosongan pengawasan dan lemahnya kontrol publik maupun sosial.

Hasil analisis di atas menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengakibatkan kemiskinan meningkat, hasil estimasi data dalam penelitian ini ternyata sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Rejekingsih (2013) mereka menyatakan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi kemiskinan hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah tidak ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, maka pengentasan kemiskinan tidak akan terwujud. Secara logis hal ini bisa dikaitkan dengan jangkauan pelayanan pendidikan kepada masyarakat miskin, di mana jika pelayanan pendidikan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin semakin tidak terjangkau, maka kemiskinan akan terus meningkat.

Pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan tingkat signifikansi sebesar 5% bahwa setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1% akan menyebabkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,37%. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya pengaruh positif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia. Hubungan antara variabel kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto dalam hasil estimasi data ternyata sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini.

Menurut Sukirno (2011), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.



Hasil estimasi data di atas menyatakan bahwa peningkatan PDRB mengakibatkan kemiskinan meningkat, Purbadharmaja (2013) dalam penelitiannya juga mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa PDRB belum bisa disimpulkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, karena disebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah.

Pada variabel angkatan kerja, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% bahwa setiap kenaikan angkatan kerja sebesar 1% akan menyebabkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin menurun sebesar 3,35%. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan adanya pengaruh negatif angkatan kerja dengan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia. Hubungan antara variabel kemiskinan dan angkatan kerja dalam hasil estimasi data ternyata sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan angkatan kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2004). Apabila pendapatan masyarakat mencapai maksimum, dan tingkat penggunaan angkatan kerja penuh dapat terwujud akan dapat mengurangi atau menurunkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin.

Hasil estimasi data menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja terhadap kemiskinan negatif dan signifikan. Hasil ini sejalan dengan teori Todaro (1978) menurut teori ini salah satu mekanisme yang utama dalam mengurangi kemiskinan adalah menanggulangi masalah tenaga kerja. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tingginya angkatan kerja memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, dimana tingginya partisipasi angkatan kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan penelitian ini, Widyasworo (2014) menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja wanita mempunyai pengaruh paling dominan terhadap tingkat kemiskinan dengan sifat hubungan negatif. Dimana hal ini dapat dijelaskan bahwa partisipasi angkatan kerja wanita sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi angka partisipasi kerja wanita, maka pendapatan rumah tangga miskin tersebut akan semakin meningkat pula, yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan keluarga karena kebutuhan dasar hidupnya mampu dipenuhi dan ini menandakan bahwa mereka pelan-pelan meninggalkan lingkaran kemiskinan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (anggaran pendidikan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengakibatkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin meningkat di setiap provinsi Indonesia, berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan belum teralokasi dengan baik terhadap pengurangan kemiskinan, dikarenakan pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan untuk keluarga miskin belum efektif dan efisien.
2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan PDRB akan meningkatkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia, berarti bahwa variabel PDRB sebenarnya diperlukan dan menjadi pilihan namun tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan. Permasalahannya bukan hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan PDRB semata, tetapi yang perlu diperhatikan bagaimana distribusi dan pemerataannya.

3. Variabel Angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan angkatan kerja akan mengurangi kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia. Apabila pendapatan masyarakat mencapai maksimum, dan penggunaan angkatan kerja penuh dapat terwujud maka akan dapat mengurangi atau menurunkan kemiskinan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan meningkatkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia, maka pemerintah hendaknya lebih memantau di lapangan dalam pengalokasian dana pendidikan dengan dibantu oleh Tim Pencegahan KPK agar permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan dapat dikendalikan dan diatasi.
2. Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel PDRB meningkatkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia, hal ini dikarenakan tidak meratanya hasil pembangunan, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan PDRB serta distribusi pendapatan yang merata guna menekan angka kemiskinan serta menaikkan pendapatan rumah tangga, sehingga dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
3. Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel angkatan kerja dapat mengurangi kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia, maka pemerintah harus lebih memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengimbangi laju pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia guna meminimalisir terjadinya pengangguran dan peningkatan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bourguignon, F., & Chakravarty, S. R. 2003. *The measurement of multidimensional poverty*. The Journal of Economic Inequality, 1(1), Hal. 25-49. Indian Statistical Institute, Calcutta India.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. 2006. *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hudiyanto. 2013. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Mahsunah, D. 2013. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal*. Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya.
- Mangkoesebroto, G. 1994. Pointers: Tantangan dan Prospek Pengumpulan Pajak sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan. *Dalam Seminar Sehari Tantangan dan Prospek Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era PJPT II*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Mankiw, N. G. 2003. *Teori Makroekonomi*. terj. Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. 2004. *Principle of Economics*. Ohio: South-Western of Thomson Learning. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasir, M., & Saichudin, M. 2008. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo”. *Jurnal*, 5(4). Institute Pertanian Bogor.

- Payaman, S. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Permana, A. Y., & Arianti, F. 2012. "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009". *Doctoral dissertation*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Prawoto, N. 2008. "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya". *JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, hal.56-68. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prawoto, N. 2016. "Analysis of Factors Affecting Unemployment in Indonesia in 1984-2013". *4th International Conference Of Business, Economics, Management, Information Technology and Social Science 3-4 Sep 2016, Phuket, Thailand*". Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Purbadharmaja, dkk. 2013. "Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali". *E-jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Udayana. Vol. 2, No. 8.
- Saputra, W. A., & Mudakir, Y. B. 2011. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah". *Doctoral dissertation*. Universitas Diponegoro.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. 2008. "Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin". Jakarta: Departemen Pertanian.
- Sitepu, R. K., & Sinaga, B. M. 2004. "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium". *Jurnal SOCA*, 7(2), hal. 153-157. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Statistik, B. P. 2000. *Indikator Sosial Ekonomi*. Jakarta
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan masalah kebijaksanaan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. 2000. *Makroekonomi Modern: perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

- Sukirno, S. 2011. *Introduction to Macroeconomic Theory*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparmoko, M. 2002. *Buku pedoman penilaian ekonomi sumberdaya alam & lingkungan: konsep dan metode penghitungan*. BPFE: Fakultas Ekonomi UGM.
- Todaro, M. P. dan Smith, Stephen, C. 2011. *Pembangunan Ekonomi; Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, Michael P. 1978. *Pembangunan Ekonomi, Dunia Ketiga, Edisi ke tujuh*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Dunia Ketiga, Edisi ke sembilan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Utama, S.B. & N.A. Kustiani. 2012. "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi Fiskal". *Kajian Akademis BPPK*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Wibowo, D. A. 2014. "Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah". *Jurnal Economia*, 10(2), hal. 133-140. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widodo, A., Waridin, W., & Maria, K. 2014. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), hal. 175-183. Universitas Diponegoro.
- Widyasworo, R. 2014. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Angkatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus tahun 2008-2012)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1). Universitas Brawijaya.
- Wijayanto, R. D., & Arianti, F. 2010. "Analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008". *Doctoral dissertation*. Universitas Diponegoro.
- Zuluaga, B. 2007. "Different channels of impact of education on poverty: An analysis for Colombia". *Journal*. Universidad Icesi - Economics & Management.

Zulyanto, A. 2017. *Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan*. Pencapaian MGDs di Indonesia. Universitas Padjadjaran: UNPAD Press.

**Sumber Internet:**

<http://www.bappenas.go.id/>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2018 pada jam 21.45

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2018 pada jam 17.40

<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/34>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pada jam 11.20

<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2007/10/26/peraturan-mendagri-no-59-tahun-2007>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pada jam 11.45

<https://www.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 9 November 2017 pada jam 11.50

<https://www.google.com/>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pada jam 21.55

<https://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/statistik-indonesia-kemiskinan-di-indonesia-meningkat-akibat-inflasi-tinggi/item5934?>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pada jam 22.04

<https://www.kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2018 pada jam 22.06

<https://www.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2018 pada jam 22.45

